







No Dokumen	073026-63201-594-RPS- 46
Semester	VII (Tujuh)
Mata Kuliah	Perpajakan (Taxation)
Kode	MKK220
Jumlah SKS	3
Tahun Akademik	2021/ 2022

STISOSPOL Waskita Dharma Malang

Program Studi Ilmu Administrasi Negara/ Publik Tahun Akademik 2021/ 2022



SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISOSPOL) "WASKITA DHARMA" MALANG PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

549

DENIGANA DEMDELATADAN GENTEGRED

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBO	Γ (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan	
Perpajakan	MKK220	Mata Kuliah Wajib	T=3	P=	5	27 Maret 2022	
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Per	ngembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI		
		SUSINI & ILM	* QUIN		Suljatmiko , S.Sos.	, A.Md.Kom, M.AP	

Capaian	CPL-PRO	DI yang dibebankan pada MK
Pembelajaran (CP)	CPL P2	Menunjukkan pengetah <mark>uan adm</mark> inistrasi publik sebagai bagian dari ilmu sosial dalam konteks pembangunan benua maritim
	CPL P3	Menunjukkan pemaham <mark>an tenta</mark> ng elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik untuk mendukung kegiatan dalam kebijakan publik
		dan manajemen publik,
	CPL P4	Mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep dan model pengambilan keputusan dalam konteks pemecahan masalah bidang
		administrasi publik, didas <mark>arkan m</mark> anajemen pengetahuan
	CPL KK 1	Melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif, khususnya dalam metode survei, penelitian lapangan, studi kasus, studi dokumen, dan
		penelitian kebijakan dalam administrasi publik
	CPL KK 2	Menerapkan teknik dan metode perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan publik dalam rangka meningkatkan
		kinerja organisasi dan pelayana <mark>n publik</mark>
	Canaian Da	embelajaran Mata Kuliah (CPMK)
	Capalan P	emberajaran wata Kunan (Crivik)

CPMK	Setelah mengikuti matakuliah administrasi perpajakan, mahasiswa memiliki kemampuan meliputi:					
	• Memahami dan menjelaskan tentang konteks administrasi perpajakan dalam administrasi negara, teori, konsep, dan pengertian pajak serta paradigma perpajakan					
	Memahami dan menjelaskan bagaimana kebijakan dan sistem perpajakan Indonesia dan ketentuan umum & tata cara perpajakan					
	Memahami dan menjelaskan mengenai pajak penghasilan dan obyek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)					
	 Memahami dan menjelaskan tentang kebijakan fiskal kaitannya dengan pajak 					
	 Memahami dan menjelaskan mengenai pajak final dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta bea materai 					
	 Memahami dan menjelaskan teori, konsep dan kebijakan yang berkaitan dengan pajak daerah & retribusi daerah 					

Sub-	СРМК	
Sub-	Mahasiswa dapat memahami etika pembela publik .(P2)	ujaran, RPS dan konsep dasar administrasi perpajakan dalam konteks kajian administrasi
Sub-		peran dan fungsi pajak, pengertian dan kedudukan hukum pajak, cara pemungutan pajak, pemerintah memungut pajak, azas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak. (P2)
Sub-	1	p pajak dalam paradigm <mark>a klasik d</mark> an kontemporer, teori asuransi, teori kepentingan, teori rbedaan pajak dengan pungutan lainnya. (P3)
Sub-		erpajakan dan administrasi perpajakan secara komprehensif dan holistik dan memahami nu publik dan apa dasar kewenangan Negara untuk memungut pajak kepada sesorang atau
Sub-		ın pengertian NPWP, NPPKP, SPT, SKP dan STP, kewajiban pembukuan, pemeriksaan dan ngketa pajak serta penagihan pajak, dan sanksi perpajakan (P4)
Sub-		silan Umum dengan pengertian subyek pajak, obyek pajak, kompensasi kerugian, PTKP, Usaha Tetap (BUT) dengan pengertian bentuk usaha tetap (BUT), obyek pajak BUT, 24 & KK1)
Sub-	1 3	silan 21, dengan pengertian PPh 21, mekanisme pemotongan PPh pasal 21, subyek dan nya, dan cara penghitungan PPh pasal 21dan pengisian SPT PPh pasal 21. (KK1 & KK2)
Sub-	1	silan Pasal 22 dan 24 dengan pengertian PPh pasal 22, dan PPh pasal 24, mekanisme serta tarif dan perhitungannya. (KK1 & KK2)
Sub-	PPh terutang dan Pajak Penghasilan Fiskal L	lan Pasal 23 dan 26, pengertian dan mekanisme PPh 23, dan PPh pasal 26 perhitungan uar Negeri dengan pengertian PPh pasal 25 dan Fiskal Luar Negeri, penghitungan angsuran i dan Pajak yang bersifat final (KK1 & KK2)

		memahami Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dengan pengertian BKP, JKP, obyek, tarif, dasar pengenaan dan n PPN (KK1 & KK2)
	dan tarif, s	dapat memahami Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dengan pengertian PPn BM, karakteristik PPn BM, obyek erta mekanisme perhitungannya dan memahami Bea Materai dengan pengertian bea meterai, dasar pengenaan bea materai, tarif bea meterai. (KK1 & KK2)
		dapat memahami Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pengertian pajak daerah dan retribusi daerah, jenis-jenis, objek ingutannya, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah (P2, P3, P4, K2)
Deskripsi Singkat MK	membahas tentang dasa	i perpajakan mendeskripkan baik secara teori, norma dan praktek perpajakan, sehingga matakuliah ini didesain untuk r – dasar perpajakan yang meliputi filosofi pajak, pajak dalam perspektif administrasi publik, nilai nilai administrasi public etahuan dasar tentang perpajakan dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta pengetahuan tentang pajak dan retribusi
Bahan Kajian /	Pajak dalam adn	inistrasi negara
Materi	2. Pengertian pajak	& paradigma pajak
Pembelajaran	3. Sistem perpajaka	n Indonesia
	4. Ketentuan umun	& tata cara p <mark>erpajaka</mark> n
	5. Pajak penghasila	
	• •	tuk Usaha Teta <mark>p (BUT)</mark>
	7. Kebijakan fiskal	
	8. Pajak final	
		an nilai barang dan j <mark>asa</mark>
	10. Bea materai	
	11. Pajak daerah & 1	etribusi daerah
Pustaka	Utama:	

						(online)				
			Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring				
Pekan Ke-	(Kemamp	CPMK nan akhir tiap n belajar)	Penil		Bantuk Pemb Metode Pemb Penugasan M [Estimasi	oelajaran, ahasiswa,	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)		
Matak	uliah syarat	Amril Hans Irma Ariyar	s, SAP., MPA nti Arif, S.Sos., M.Si administrasi Publik			7				
Dosen Pengampu		Dr. Gita Su	 Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si Dr. Gita Susanti, M.Si Drs. Lutfi Atmansyah, MA 							
		_	ndang Nomor 10 Tahun 20 Pemerintah Nomor 55 Tah		an Umum Dan Tata C	ara Pemungutan	Pajak Daerah			
		Pendukung:								
		6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah								
		5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan								
		4. Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Depok: Rajagrafindo Persada.								
		3. Resmi, Siti. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat								
			2. Waluyo, 2005. Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Terbaru, Buku Satu-Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat.							
		1. Mardiasmo, 2011. <i>Perpajakan</i> . Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.								

1	Mahasiswa dapat memahami etika pembelajaran, RPS dan konsep dasar administrasi perpajakan dalam konteks kajian administrasi publik	Memahami dengan baik etika pembelajaran, RPS Matakuliah, dan konsep dasar administrasi perpajakan dalam konteks kajian administrasi publik	Kehadiran (1) Partisipasi aktif di kelas (4)	□ Brainstorming *TM: (3x50")+ [PT+BM: (1+1) x (3x60")+	Register di SIKOLA • SIKOLA • RPS • Peraturan Akademik	RPS MatakuliahPeraturan AkademikBahan ajar dosen	
2	Mahasiswa dapat memahami tentang pajak, peran dan fungsi pajak, pengertian dan kedudukan hukum pajak, cara pemungutan pajak, tarif pajak dan hapusnya utang pajak, alasan pemerintah memungut pajak, azas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak.	Memahami dengan baik pengertian pajak, peran & fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, tarif pajak dan hapusnya utang pajak, alasan pemerintah memungut pajak, azas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak.	Kehadiran (1) Partisipasi aktif di kelas (4)	• Lecture • Brainstorming *TM: (3x50")+ [PT+BM: (1+1) x (3x60")+	 SIKOLA (unduh materi ajar dosen) RPS WAG 	Pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, tarif pajak dan hapusnya utang pajak, alasan-alasan pemerintah memungut pajak, azas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak. (Mardiasmo, 2011: 1-9) (Waluyo, 2005: 1-12) (Resmi, 2013: 1-7) (UU No. 28/2007) (PP No. 55/2016)	
3	Mahasiswa dapat memahami tentang konsep pajak dalam paradigma klasik dan kontemporer, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori daya beli, teori bakti dan perbedaan pajak dengan pungutan lainnya.	Memahami dengan jelas tentang konsep pajak dalam paradigma klasik dan kontemporer, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori daya beli, teori bakti dan perbedaan pajak dengan pungutan lainnya	Kehadiran (1) Partisipasi aktif di kelas (4)	• Lecture • Brainstorming *TM: (3x50")+ [PT+BM: (1+1) x (3x60")+	 SIKOLA (unduh materi ajar dosen) RPS WAG 	Materi konsep pajak dalam paradigma klasik dan kontemporer, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori daya beli, teori bakti dan perbedaan pajak dengan pungutan lainnya (Mardiasmo, 2011: 2-9) (Resmi, 2013: 5-6)	

						(UU No. 28/2007) (PP No. 55/2016)
4	Mahasiswa mampu memahami kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan secara komprehensif dan holistik	Memahami dengan jelas bagaimana kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan secara komprehensif dan holistik	Kehadiran (1) Partisipasi aktif di kelas (2) Presentasi individual (2)	• Lecture • Brainstorming *TM: (3x50")+ [PT+BM: (1+1) x (3x60")+	 SIKOLA (unduh materi ajar dosen) RPS WAG 	Kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan secara komprehensif dan holistik (Rosdiana, 2012: 10-67) (UU No. 28/2007) (PP No. 55/2016)
5	Mahasiswa mampu memahami hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik dan apa dasar kewenangan Negara untuk memungut pajak kepada sesorang atau suatu badan	Memahami dengan jelas bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik dan apa dasar kewenangan Negara untuk memungut pajak kepada sesorang atau suatu badan	Kehadiran (1) Partisipasi aktif di kelas (2) Presentasi individual (2)	• Lecture • Brainstorming *TM: (3x50")+ [PT+BM: (1+1) x (3x60")+	 SIKOLA (unduh materi ajar dosen) RPS WAG 	Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik dan apa dasar kewenangan Negara untuk memungut pajak kepada sesorang atau suatu badan (Waluyo, 2005: 7-11) (Resmi, 2013: 4-6) (UU No. 28/2007) (PP No. 55/2016)
6	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian NPWP, NPPKP, SPT, SKP dan STP, kewajiban pembukuan	Memahami dengan jelas pengertian NPWP, NPPKP, SPT, SKP dan STP, kewajiban pembukuan	Kehadiran (1) Partisipasi aktif di kelas (4)	• Lecture • Brainstorming *TM: (3x50")+ [PT+BM: (1+1) x (3x60")+	 SIKOLA (unduh materi ajar dosen) RPS WAG 	Pengertian NPWP, NPPKP, SPT, SKP dan STP, kewajiban pembukuan (Mardiasmo,2011: 25-62) (UU No. 28/2007) (PP No. 55/2016)

7	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pemeriksaan dan penyidikan pajak, keberatan dan banding, sengketa pajak serta penagihan pajak, dan sanksi perpajakan	Memahami dengan jelas mengenai pemeriksaan dan penyidikan pajak, keberatan dan banding, sengketa pajak serta penagihan pajak, dan sanksi perpajakan	Kehadiran (1) Partisipasi aktif di kelas (2) Test Kuis (2)	• Lecture • Brainstorming [TM: (3x50")+ [PT+BM: (1+1) x (3x60")+	• SIKOLA (unduh materi ajar & Soal kuis di kelas)	Pemeriksaan dan penyidikan pajak, keberatan dan banding, sengketa pajak serta penagihan pajak, dan sanksi perpajakan	
			asm & II	NU POI	□ WAG	(Mardiasmo, 2011: 125133) (UU No. 28/2007) (PP No. 55/2016)	
8	Evaluasi Tengah Semester / U	jian Tengan Semester					
9	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Pajak Penghasilan Umum dengan pengertian subyek pajak, obyek pajak, kompensasi kerugian, PTKP, tarif pajak serta perhitungan PPh. dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan pengertian bentuk usaha tetap (BUT), obyek pajak BUT, perlakuan PPh terhadap penghasilan BUT.	Memahami dengan jelas tentang Pajak Penghasilan Umum melalui pengertian subyek pajak, obyek pajak, kompensasi kerugian, PTKP, tarif pajak serta perhitungan PPh. dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan pengertian bentuk usaha tetap (BUT), obyek pajak BUT, perlakuan PPh terhadap penghasilan BUT.	Kehadiran (1) Partisipasi aktif di kelas (2) Presentasi (2)	• Lecture • Small group discussion [TM: (3x50")+ [PT+BM: (1+1) x (3x60")+	 SIKOLA (unduh materi ajar dosen) RPS WAG 	Pajak Penghasilan Umum dengan pengertian subyek pajak, obyek pajak, kompensasi kerugian, PTKP, tarif pajak serta perhitungan PPh. dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan pengertian bentuk usaha tetap (BUT), obyek pajak BUT, perlakuan PPh terhadap penghasilan BUT. (Mardiasmo, 2011: 155-165) (Waluyo, 2005: 103-108) (UU No. 28/2007) (PP No. 55/2016)	

10	Mahasiswa dapat memahami Pajak Penghasilan 21, dengan pengertian PPh 21, mekanisme pemotongan PPh pasal 21, subyek dan obyek PPh pasal 21 serta hak dan kewajibannya, dan cara penghitungan PPh pasal 21dan pengisian SPT PPh pasal 21.	Memahami dengan jelas Pajak Penghasilan 21, dengan pengertian PPh 21, mekanisme pemotongan PPh pasal 21, subyek dan obyek PPh pasal 21 serta hak dan kewajibannya, dan cara penghitungan PPh pasal 21dan pengisian SPT PPh pasal 21.	Kehadiran (1) Partisipasi aktif di kelas (2) Presentasi (2)	• Lecture • Small group discussion *TM: (3x50")+ [PT+BM: (1+1) x (3x60")+	 SIKOLA (unduh materi ajar dosen) RPS WAG 	Pajak Penghasilan 21, dengan pengertian PPh 21, mekanisme pemotongan PPh pasal 21, subyek dan obyek PPh pasal 21 serta hak dan kewajibannya, dan cara penghitungan PPh pasal 21dan pengisian SPT PPh pasal 21. (Mardiasmo, 2011: 168186)
				0		(Resmi, 2013: 173-242) (UU No. 28/2007) (PP No. 55/2016)
11	Mahasiswa dapat memahami Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 24 dengan pengertian PPh pasal 22, dan PPh pasal 24, mekanisme pemotongan PPh pasal 22 dan PPh pasal 24, serta tarif dan perhitungannya.	Memahami dengan baik Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 24 dengan pengertian PPh pasal 22, dan PPh pasal 24, mekanisme pemotongan PPh pasal 22 dan PPh pasal 24, serta tarif dan perhitungannya.	Kehadiran (1) Partisipasi aktif di kelas (2) Presentasi (2)	• Lecture • Small group discussion *TM: (3x50")+ [PT+BM: (1+1) x (3x60")+	 SIKOLA (unduh materi ajar dosen) RPS WAG 	Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 24 dengan pengertian PPh pasal 22, dan PPh pasal 24, mekanisme pemotongan PPh pasal 22 dan PPh pasal 24, serta tarif dan perhitungannya. (Mardiasmo, 2011: 226- 249) (Waluyo, 2005: 181-206) (UU No. 28/2007) (PP No. 55/2016)

12	Mahasiswa dapat memahami Pasal Penghasilan Pasal 23 dan 26, pengertian dan mekanisme PPh 23, dan PPh pasal 26 perhitungan PPh terutang dan Pajak Penghasilan Fiskal Luar Negeri dengan pengertian PPh pasal 25 dan Fiskal Luar Negeri, penghitungan angsuran PPh pasal 25, Perhitungan Fiskal Luar Negeri dan Pajak yang bersifat final.	Mahasiswa dengan baik dapat memahami Pasal Penghasilan Pasal 23 dan 26, pengertian dan mekanisme PPh 23, dan PPh pasal 26 perhitungan PPh terutang dan Pajak Penghasilan Fiskal Luar Negeri dengan pengertian PPh pasal 25 dan Fiskal Luar Negeri, penghitungan angsuran PPh pasal 25, Perhitungan Fiskal Luar Negeri dan Pajak yang bersifat final.	Kehadiran (1) Partisipasi aktif di kelas (2) Presentasi (2)	• Lecture • Small group discussion *TM: (3x50")+ [PT+BM: (1+1) x (3x60")+	 SIKOLA (unduh materi ajar dosen) RPS WAG 	Pasal Penghasilan Pasal 23 dan 26, pengertian dan mekanisme PPh 23, dan PPh pasal 26 perhitungan PPh terutang dan Pajak Penghasilan Fiskal Luar Negeri dengan pengertian PPh pasal 25 dan Fiskal Luar Negeri, penghitungan angsuran PPh pasal 25, Perhitungan Fiskal Luar Negeri dan Pajak yang bersifat final. (Mardiasmo, 2011: 235- 264) (Waluyo, 2005: 187-195) (UU No. 28/2007) (PP No. 55/2016)
13	Mahasiswa memahami Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dengan pengertian BKP, JKP, obyek, tarif, dasar pengenaan dan perhitungan PPN.	Memahami dengan jelas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dengan pengertian BKP, JKP, obyek, tarif, dasar pengenaan dan perhitungan PPN.	Kehadiran (1) Partisipasi aktif di kelas (2) Presentasi (2)	• Lecture • Small group discussion *TM: (3x50")+ [PT+BM: (1+1) x (3x60")+	 SIKOLA (unduh materi ajar dosen) RPS WAG 	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dengan pengertian BKP, JKP, obyek, tarif, dasar pengenaan dan perhitungan PPN. (Mardiasmo, 2011: 273283) (UU No. 28/2007) (PP No. 55/2016)

14	Mahasiswa dapat memahami Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dengan pengertian PPn BM, karakteristik PPn BM, obyek dan tarif, serta mekanisme perhitungannya dan memahami Bea Materai dengan pengertian bea meterai, dasar pengenaan bea materai, obyek dan tarif bea meterai.	Memahami dengan baik Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dengan pengertian PPn BM, karakteristik PPn BM, obyek dan tarif, serta mekanisme perhitungannya dan memahami Bea Materai dengan pengertian bea meterai, dasar pengenaan bea materai, obyek dan tarif bea meterai.	Kehadiran (1) Partisipasi aktif di kelas (2) Presentasi (2)	• Lecture • Small group discussion *TM: (3x50")+ [PT+BM: (1+1) x (3x60")+	 SIKOLA (unduh materi ajar dosen) RPS WAG 	Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dengan pengertian PPn BM, karakteristik PPn BM, obyek dan tarif, serta mekanisme perhitungannya dan memahami Bea Materai dengan pengertian bea meterai, dasar pengenaan bea materai, obyek dan tarif bea meterai. (Mardiasmo, 2011: 284301) (UU No. 10/2020)	
15	Mahasiswa dapat memahami Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pengertian pajak daerah dan retribusi daerah, jenis-jenis, objek dan cara pungutannya, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah	Memahami dengan baik tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pengertian pajak daerah dan retribusi daerah, jenis- jenis, objek dan cara pungutannya, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengembangan pajak	Kehadiran (1) Partisipasi aktif di kelas (2) Test Kuis (2)	• Lecture • Brainstorming *TM: (3x50")+ [PT+BM: (1+1) x (3x60")+	 SIKOLA (unduh materi ajar soal kuis) RPS WAG 	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pengertian pajak daerah dan retribusi daerah, jenis-jenis, objek dan cara pungutannya, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah	
		daerah dan retribusi daerah				(Mardiasmo, 2011: 11-19) (UU No. 28/2009)	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						



Catatan:

- 1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- 2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- 3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- 4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- 5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

- 6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikatorindikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- 7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- 8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- 9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- 10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- 11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- 12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

